

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan suatu daerah adalah dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi tersebut (Sagir, 2001). Perluasan kesempatan kerja masih merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi, hal ini mengingat besarnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan besar angka pencari kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kondisi yang demikian akan menjadi masalah kalau tidak didukung oleh kekuatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan perluasan kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Di Indonesia kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Ini karena masih ada kesenjangan untuk mendapatkannya. Kesempatan kerja itu tidak hanya menyangkut permasalahan dalam bidang perekonomian, tetapi juga dalam bidang sosial terutama dalam masa-masa krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Masalah ketenagakerjaan hampir ada di seluruh negara saat ini baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal itu terlihat dari selalu adanya departemen yang mengurus ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Biasanya pada, negara maju ada pada masalah ketenagakerjaan yang berhubungan

dengan tingginya gaji tenaga kerja, tenaga kerja ilegal, pengangguran bertambah karena mekanisasi (penggunaan robot). Sedangkan di negara berkembang, masalah ketenagakerjaan biasanya berkaitan dengan rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, rendahnya tingkat gaji, sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran. Meskipun pemerintah memperlihatkan adanya usaha untuk mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan ini tetapi dalam kenyataannya kebijakan-kebijakan yang dibuat belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat besar dan kompleks. Besar karena menyangkut jutaan jiwa tenaga kerja. Kompleks karena tenaga kerja mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk di rumuskan (Tobing, 2006). Faktor demografis mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja. Indonesia cukup berhasil dalam menurunkan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan. Namun, hal ini justru berdampak pada pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.

Pembangunan di Provinsi Maluku telah berkembang cukup baik. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,657,409 jiwa atau 349,281 rumah tangga (2010-2014) telah banyak infrastruktur yang dibangun untuk merespon kebutuhan mobilitas masyarakat, hasrat memacu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan. Pembangunan ini terus berjalan

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan menurunnya kualitas daya dukung lingkungan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Keberhasilan Provinsi Maluku di dorong oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Maluku. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Proses pembangunan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama dimana dapat terjadi penurunan dan kenaikan.

Todaro (2000) menjelaskan tingginya upah yang di peroleh di daerah lain di banding dengan upah yang di peroleh di daerah sebelumnya menjadi penyebab terjadinya perpindahan penduduk. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara desa atau daerah dan kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk mencari pekerjaan di kota. Di bawah ini merupakan data perkembangan Upah Minimum Nasional.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak ditetapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktifitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2009:1). Di indonesia pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05/Men/1989 tanggal 29 Mei

1989 tentang Upah Minimum. Upah Minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada kebutuhan Fisik Hidup Layak berupa kebutuhan akan pangan sebesar. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai “*upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap*”

Kesempatan kerja yang ada dimasyarakat dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi agar dapat sebanding dengan kenaikan tingkat upah yang ditentukan dalam upah minimum. Dengan produktivitas yang tinggi maka tingkat kompetitif negara menjadi naik dan akan semakin mengundang banyak investasi yang masuk. Dengan banyak investasi yang masuk maka akan semakin banyak lapangan kerja baru yang terbuka dan banyak tenaga kerja yang akan terserap.

Investasi berpengaruh besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan. Besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya permintaan tenaga kerja. Semakin besar investasi maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja.

Sebagai daerah yang memiliki beragam kekayaan alam, Maluku menjadi kawasan yang potensial untuk mengembangkan investasi. Maluku memiliki nilai strategis dan potensi unggulan yang bisa dikembangkan dalam pengembangan investasi. Nilai strategis tersebut bisa dilihat dari posisi geostrategis, kebaharian, dan wilayah perbatasan negara. Selain itu potensi unggulan Maluku meliputi sektor perikanan, perkebunan, pariwisata, energi

dan sumber daya mineral. Di sektor pertanian , Maluku memiliki komoditi unggulan berupa pala, cengkeh, dan kelapa. Dalam sektor perikanan, daerah ini memiliki komoditi berupa rumput laut dan kerapu yang dibudidayakan, sementara untuk perikanan tangkap Maluku kaya akan ikan tuna.

Dengan adanya potensi dan komoditi unggulan yang dimiliki Maluku, maka diperlukan sinergi antara dunia usaha, pemerintah, serikat pekerja dan para pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perekonomian provinsi Maluku. Internal APINDO Maluku harus semakin kuat oleh karena itu diharapkan para pengusaha baik dari kelompok usaha yang sudah mapan (atas) maupun menengah (UKM) perlu bergabung dan membangun soliditas untuk menyuarakan kepentingan dunia usaha khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang menjamin berkembangnya arus perdagangan dan iklim investasi di Provinsi Maluku yang dapat memperkuat daya saing daerah.

DPP APINDO Maluku mengharapkan pemerintah untuk senantiasa mengajak APINDO dalam berbagai perundingan baik masalah ketenagakerjaan maupun berbagai kebijakan yang menyangkut masalah investasi, perdagangan, pariwisata, dan perekonomian lainnya.

Dari total jumlah Investasi di Indonesia pada tahun 2013, dapat dilihat nilai Investasi tertinggi terdapat pada daerah Jawa Timur hal ini disebabkan karena Jawa Timur memiliki sejumlah Industri besar. Namun disisi lain nilai proyek terbesar terdapat pada daerah Jawa Barat yaitu dengan nilai 935 proyek kemudian tingkat keduanya Jawa Tengah.

**Tabel 1.1**  
**Investasi Berdasarkan Lokasi 2013**

<b>NO</b>	<b>LOKASI PMDN</b>	<b>INVESTASI</b>	<b>PROYEK</b>
1	Jawa Timur	35.489,79	615
2	Jawa Barat	26.272,87	935
3	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	15.512,73	316
4	Jawa Tengah	15.410,71	873
5	Sumatera Selatan	10.944,09	77
6	Banten	10.709,90	367
7	Riau	9.943,04	180
8	Kalimantan Timur	9.611,31	133
9	Sulawesi Selatan	9.215,33	244
10	Kalimantan Barat	6.143,53	158
11	Sumatera Utara	4.287,42	169
12	Aceh	4.192,41	169
13	Jambi	3.540,24	82
14	Kalimantan Selatan	2.060,36	83
15	Sulawesi Tenggara	2.015,40	65
16	Sumatera Barat	1.552,49	77
17	Nusa Tenggara Timur	1.295,67	9
18	Papua	1.275,22	46
19	Kalimantan Tengah	1.270,12	38
20	Bali	1.250,35	59
21	Sulawesi Barat	1.103,80	16
22	Lampung	1.102,29	31
23	Kepulauan Bangka Belitung	1.023,74	28
24	Sulawesi Tengah	968,45	39
25	Kalimantan Utara	921,79	21
26	Kepulauan Riau	612,05	108
27	Bengkulu	553,92	18
28	Daerah Istimewa Yogyakarta	362,37	49
29	Nusa Tenggara Barat	347,85	17
30	Sulawesi Utara	270,63	50
31	Gorontalo	94,31	7
32	Papua Barat	63,45	18
33	Maluku Utara	48,23	3
<b>Total</b>		<b>179.465</b>	<b>5.100</b>

*Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*

Dibanding dengan pulau-pulau lainnya potensi Investasi di pulau Jawa telah memiliki daya pikat yang baik bagi para investor. Total investasi di

wilayah pulau jawa sendiri menjadi 103.758,37 investasi dengan total proyek sebesar 2788 proyek

Perbaikan iklim investasi menjadi salah satu tantangan terpenting yang dihadapi oleh Pemerintahan baru. Pemerintahan sebelumnya telah membuat kemajuan berarti dalam mencapai kestabilan makro ekonomi dan politik. Upaya-upaya untuk mengatasi dampak krisis keuangan dan melaksanakan rencana tindakan *White Paper* memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap kebijakan perekonomian yang sehat. Akan tetapi, lemahnya investasi di dalam negeri maupun luar negeri telah menghambat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi sesuai yang diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan pekerjaan yang layak kepada masyarakatnya. Permasalahan kesempatan kerja bukan hanya tentang ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja, tetapi juga apakah dapat lapangan kerja yang ada cukup mampu memberi imbak balik yang cukup bagi para pekerja.

Pembangunan ekonomi bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga kestabilan harga dengan selalu memperhatikan tingkat inflasi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, perhatian yang cukup terhadap neraca perdagangan, pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata, tumbuhnya investasi-investasi dan mengatasi pengangguran.

Salah satu masalah yang cukup serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah

ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya potensi yang ada., menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan dapat mendorong keresahan social dan kriminaldan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Depnakertrans 2004).

Seiring bertambahnya jumlah angkatan kerja, angka pengangguran di Maluku juga mengalami peningkatan. Peningkatan TPAK mengindikasikan naiknya pasokan tenaga kerja yang tersedia di Maluku. Secara umum, struktur ketenagakerjaan di Maluku mengalami perubahan yang cukup signifikan bila di bandingkan dengan keadaan setahun yang lalu.

**Tabel 1.2**  
**TPT menurut kelompok umur di Provinsi Maluku**

Kelompok Umur	Tahun					
	2013			2014		
	Pengangguran	Angkatan Kerja	TPT	Pengangguran	Angkatan Kerja	TPT
15-19	17,527	40,748	43.01	11,652	38,212	30.49
20-24	23,068	68,409	33.72	25,560	71,245	35.88
25-29	13,692	94,642	14.47	18,275	100,687	18.15
30-34	6,227	99,469	6.26	5,337	94,457	5.65
35-39	2,080	81,689	2.55	2,963	80,707	3.67
40-44	1,196	70,633	1.69	2,814	81,391	3.46
45-49	1,260	64,178	1.96	2,284	66,866	3.42
50-54	173	55,960	0.31	1,201	53,975	2.23
55-59	1,008	38,659	2.61	508	35,799	1.42
60+	61.00	46,334	0.13	59.00	48,965	0.12
<b>Total</b>	<b>66,292</b>	<b>668,721</b>	<b>9.91</b>	<b>70,653</b>	<b>672,304</b>	<b>10.51</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja, BPS RI



Jumlah nilai pengangguran pada Provinsi Maluku dapat dikatakan menurun. Kelompok umur 15-19 tahun, penurunan pengangguran mencapai nilai 0,504%. Penurunan tertinggi terjadi pada kelompok umur 55-59 yaitu sebesar 0,98%.

Menurunnya tingkat pengangguran di Provinsi Maluku disebabkan karena adanya perkembangan pada sektor industri dan pariwisata. Lain halnya dengan tahun 2014 pada usia kelompok 20-24 tahun tingkat pengangguran mengalami kenaikan 0,108%.

Upaya pemerintah untuk mengarahkan para penganggur agar menekuni sektor wiraswasta tampaknya terhambat oleh faktor sosio-budaya masyarakat Maluku umumnya yang kurang mendukung (cenderung ingin menjadi PNS atau orang yang bekerja di perkantoran, karena dipandang memiliki status sosial yang lebih baik). Namun seiring dengan semakin sempitnya peluang kerja dan serta semakin tinggi tuntutan untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari – hari, membuat tumbuh subur lapangan kerja sektor informal di Maluku, terutama di Kota Ambon. Pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan khusus berkembang pesat, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang becak serta tukang cukur rambut. Untuk dapat menekan angka pengangguran di Maluku, maka peran sektor swasta khususnya investasi asing langsung, sangatlah diperlukan mengingat terbatasnya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah inflasi. Inflasi merupakan peristiwa moneter yang sangat penting hamper diseluruh

negara. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula, dengan tingginya harga maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negative terhadap kesempatan kerja.

Menurut data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Maluku termasuk daerah yang tinggi tingkat penganggurannya. Maluku merupakan daerah yang terkenal dengan hasil alamnya. Namun keterbatasan dalam pengolahanlah yang membuat Maluku tidak dapat berkembang dengan baik. Ketertarikan bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bandingkan dengan menjadi pengusaha merupakan masalah yang cukup rumit di hadapi Penduduk Maluku. Sehingga untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan mengelola hasil alam yang ada di Maluku sangat sedikit di jumpai.

Masih tingginya jumlah angkatan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja merupakan masalah penting. Angkatan kerja dari tahun ke tahun di Maluku berfluktuasi dan merupakan problema memperlibatkan pasar kerja juga semakin meningkat. Situasi demikian menguatkan opini betapa pentingnya penciptaan lapangan kerja baru dan investasi pada sumber daya manusia ditengah arus globalisasi dewasa ini. Salah satu permasalahan besar dihadapi Indonesia termasuk Maluku dalam bidang ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal (*under*

*employment*). Departemen tenaga kerja memakai batasan jam kerja penuh sebesar 40 jam kerja perminggu.

Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita mengakibatkan semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi tersedia (Tambunan, 2001). Berikut merupakan data laju pertumbuhan penduduk Propinsi Maluku menurut Kabupaten/Kota :

**Table 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk**

<b>Kabupaten/Kota Regency/City</b>	<b>1990- 2000</b>	<b>2000 - 2009</b>	<b>2009 - 2010</b>	<b>2010 – 2015</b>
Maluku Tenggara Barat	1,47	(5,00)	1,47	1,33
Maluku Tenggara	2,07	(5,00)	2,46	1,03
Maluku Tengah	0,63	(3,81)	2,46	1,03
Buru	2,59	(2,90)	3,93	2,93
Kepulauan Aru	*)	*)	2,71	1,81
Seram Bagian Barat	**)	**)	1,66	1,10
Seram Bagian Timur	**)	**)	2,87	1,91
Maluku Barat Daya	***)	***)	***)	0,48
Buru Selatan	****)	****)	****)	2,04
Kota Ambon	(3,00)	3,65	5,63	3,75
Kota Tual	*)	*)	*)	2,79

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Maluku*

Catatan / Note :

- \*) Termasuk Kabupaten Maluku Tenggara/ Including South East Maluku Regncy
- \*\*\*) Termasuk Kabupaten Maluku Tengah? Including Central Maluku Regncy
- \*\*\*) Termasuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat/ Including South West Maluku Regncy
- \*\*\*\*\*) Termasuk Kabupaten Buru/ Including Buru Regncy

Laju pertumbuhan penduduk yang di gambarkan pada tabel diatas berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990 hingga 2005 pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kota Ambon dan pertumbuhan penduduk yang terkecil berada di Kabupaten Maluku Tengah ini disebabkan karena Maluku Tengah merupakan Kabupaten dimana penduduk yang bermukiman tidak sebanyak daerah-daerah lain di Provinsi Maluku dan Kota Ambon merupakan Provinsi yang tinggi pertumbuhan penduduknya disebabkan karena Kota Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku dan merupakan Pusat dari Provinsi Maluku..

Dalam rangka penciptaan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi masalah pengangguran, maka pemerintah daerah perlu memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut yang tercermin dalam PDRB. PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa.

Pada dasarnya diantara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja memiliki hubungan yang positif, yaitu apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesempatan kerja yang tercipta juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya (Harijono, 2013). Hal ini disebabkan karena pertumbuhan

ekonomi selalu dipakai sebagai ukuran terciptanya lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Dari perumusan diatas penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh investasi, tingkat upah dan PDRB terhadap perkembangan kesempatan kerja di Provinsi Maluku. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tingkat perkembangan kesempatan kerja di Provinsi Maluku pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Maka penulis menggunakan judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI MALUKU PERIODE TAHUN 2010-2014”**

## **B. BATASAN MASALAH**

Agar dalam penelitian ini objek yang diteliti tidak terlalu luas, maka pembahasan penelitian perlu di batasi. Dalam penelitian ini objek yang diambil adalah hasil data statistik mengenai perkembangan kesempatan kerja pada Provinsi Maluku yang telah di publikasikan.

1. Variabel-variabel yang di anggap berpengaruh terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Maluku yaitu Investasi, Tingkat Upah, Inflasi dan PDRB
2. Data yang digunakan adalah data tahunan yaitu tahun 2010-2014 terdiri atas:
  - a. Jumlah Investasi Provinsi Maluku
  - b. Tingkat Upah Provinsi Maluku
  - c. Inflasi Provinsi Maluku
  - d. PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Maluku.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Maluku selama tahun 2010-2014.
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Upah terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Maluku selama tahun 2010-2014.
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap kesempatan kerja di Propinsi Maluku selama tahun 2010-2014.
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Maluku selama tahun 2010-2014.

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Setiap penelitian pasti mempunyai beberapa tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Maluku.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Upah terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Maluku.
3. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Maluku.
4. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Maluku.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **I. Bagi Penulis**

Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, membuktikan serta memberikan gambaran kongkrit mengenai ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya

### **II. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pemerintah Kota Propinsi Maluku dalam mengambil keputusan rencana peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

### **III. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dunia pustaka para pembaca dan sebagai wacana untuk penelitian selanjutnya.